



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.114, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78112
Telp. 0561-732065, Fax. 0561-732065
Web: pt-pontianak.go.id – Email: pengadilantinggipontianak@gmail.com

Pontianak, 23 Juli 2025

Nomor : 1708 /KPT.W17-U/PW1.1.1/VII/2025
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Pada Pengadilan Negeri Pontianak

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak dimaksudkan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Pontianak memperoleh nilai sebesar **75,80 atau BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,85	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25	20,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,70	75,80
Predikat			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Pada indikator “Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)”, terdapat kondisi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat dokumen Kerangka Logis Pengadilan Negeri Pontianak yang memuat informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)
2.	Pada indikator “Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan”, terdapat kondisi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat Dokumen SOP Pengadilan Negeri Pontianak Reviu Tahun 2024 (SK Tim Reviu, Monev Reviu, dan SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan)
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Pada indikator “Pengukuran Kinerja telah dilakukan”, terdapat kondisi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat Dokumen SOP Pengukuran Kinerja Berjenjang dan SK Pengumpulan Data Kinerja pada Pengadilan Negeri Pontianak.
2.	Pada indikator “Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan”, terdapat kondisi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat dokumen Monev Rapat Dinas Bulanan Tahun 2025 dan Laporan Capaian Kinerja TW I Tahun 2025 Belum terdapat SK dan SOP Pengumpulan Data Kinerja juga SK dan SOP Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 Belum terdapat hasil <i>screenshot</i> Data SIPP dan MISS Tahun 2025 Belum terdapat rapat monev berjenjang perbidang tahun 2024 dan tahun 2025, serta dokumen rapat berjenjang kesekretariatan maupun kepaniteraan tahun 2025
3.	Pada indikator “Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien”, terdapat kondisi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat dokumen Kinerja Hakim (rekapitulasi kehadiran, tanda terima transport hakim), dokumen Pengajuan Tukin Tahun 2025, dan Dokumen PCK seluruh aparatur pengadilan tahun 2025 Belum terdapat lampiran dokumen SKP/PKP/PCK dari pejabat/pegawai yang dibaperjakukan Belum terdapat dokumen monev rapat dinas bulanan tahun 2025 (Notulensi, LHP dan TLHP) Belum terdapat dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Belum terdapat dokumen Reviu SOP Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2024 dan 2025 Belum terdapat Dokumen Revisi Anggaran dan Rapat Revisi Anggaran Tahun 2025 Belum terdapat Laporan Monev Bappenas (perbulan dan triwulan) Tahun 2024 - 2025
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Pada indikator “Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya”, terdapat kondisi yaitu:

	<p>a. Belum terdapat bab pada dokumen LKjIP PN Pontianak yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.</p> <p>b. File "Perbandingan Realisasi Kinerja PN Pontianak dengan Satker Lain Sesuai Tingkatannya" yang diupload seharusnya dimasukkan dalam dokumen LKjIP Tahun 2024</p>
2.	<p>Pada indikator "Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya", terdapat kondisi yaitu:</p> <p>a. Belum terdapat dokumen Monev Rencana Aksi Tahun 2024 yang memuat jadwal monev, hasil/rekomendasi monev, dan tindak lanjutnya</p> <p>b. Belum terdapat dokumen monev rapat dinas bulanan tahun 2025 (Notulensi, LHP dan TLHP</p> <p>c. Belum terdapat dokumen PKP seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025</p> <p>d. Belum terdapat Dokumen Revisi Anggaran dan Rapat Revisi Anggaran Tahun 2025</p> <p>e. Belum terdapat Laporan Monev Bappenas (perbulan dan triwulan) Tahun 2024 - 2025</p> <p>f. Belum terdapat eviden yang menggambarkan evaluasi pencapaian kinerja telah menggunakan informasi yang dituangkan dalam LKjIP Tahun 2024</p> <p>g. Belum terdapat eviden yang menggambarkan kegiatan penyesuaian perencanaan kinerja menggunakan informasi dalam LKjIP</p> <p>h. Belum terdapat dokumen Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir di Pengadilan Negeri Pontianak (Apel Pagi/Sore, Banner Budaya Kerja, Pembinaan Budaya Kerja, Rewards)</p>

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1.	<p>Pada indikator "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan", namun terdapat kondisi :</p> <p>a. Belum terdapat SK Pedoman Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 dan 2025</p> <p>b. Belum terdapat SOP Pengumpulan Data Secara Berjenjang</p> <p>c. Belum terdapat Rapat Dinas Evaluasi Kinerja Bulanan, Rapat Berjenjang Tiap Bidang, atau Rapat Kesekretariatan maupun Rapat Kepaniteraan</p>
2.	<p>Pada indikator "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai", namun terdapat kondisi :</p> <p>a. Belum terdapat SK Pedoman Evaluasi AKIP Internal dan SOP Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 dan 2025</p> <p>b. Belum terdapat SK Tim Penyusun SAKIP 2024 dan SK Tim Evaluasi AKIP Internal 2024</p> <p>c. Belum terdapat dokumen Rapat Evaluasi Akip Internal Tahun 2024 sesuai SK dan SOP yang telah ditentukan</p>
3.	<p>Pada indikator "Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja", namun terdapat kondisi :</p> <p>a. Belum terdapat dokumen LHE 2022, TL LHE 2022, dan LHE 2023, sehingga belum menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP</p> <p>b. Belum ada dokumentasi Sosialisasi LHE dan TL LHE AKIP Tahun 2023 ke seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pontianak</p>

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	<p>Pada indikator “Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>Cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>Crosscutting</i>”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menyusun dan melampirkan dokumen Kerangka Logis Pengadilan Negeri Pontianak yang memuat informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)
2	<p>Pada indikator “Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan”, untuk optimalisasinya agar satker dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menambahkan Dokumen SOP PN Pontianak Reviu Tahun 2024 (SK Tim Reviu, Monev Reviu, dan SOP Kepaniteraan dan Kesekretariatan) b. Agar menambahkan Monev Rapat Dinas Bulanan Tahun 2025 dan Laporan Capaian Kinerja TW I Tahun 2025
B. Pengukuran Kinerja	
1.	<p>Pada indikator “Pengukuran Kinerja telah dilakukan”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menyusun dan melampirkan SOP Pengukuran Kinerja Berjenjang dan SK Pengumpulan Data Kinerja
2.	<p>Pada indikator “Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menambahkan Monev Rapat Dinas Bulanan Tahun 2025 dan Laporan Capaian Kinerja TW I Tahun 2025 b. Agar menyusun dan melampirkan SOP Pengukuran Kinerja Berjenjang dan SK Pengumpulan Data Kinerja c. Agar melampirkan hasil screenshoot Data SIPP dan MISS Tahun 2025 d. Agar menambahkan dokumen Rapat Monev Berjenjang Perbidang Tahun 2024 Dan Tahun 2025, dan dokumen Rapat Berjenjang Kesekretariatan maupun Kepaniteraan Tahun 2025
3.	<p>Pada indikator “Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menambahkan dokumen Kinerja Hakim (rekapitulasi kehadiran, tanda terima transport hakim), Pengajuan Tukin Tahun 2025, Dokumen PCK seluruh aparatur pengadilan tahun 2025 b. Agar melampirkan dokumen SKP/PKP/PCK dari pejabat/pegawai yang di baperjakan c. Agar menambahkan dokumen Monev Rapat Dinas Bulanan Tahun 2025 (Notulensi, LHP dan TLHP), dokumen Rapat Tinjauan Manajemen, dan Dokumen Reviu SOP 2024 dan 2025 d. Agar menambahkan Dokumen Revisi Anggaran dan Rapat Revisi Anggaran Tahun 2025, serta Laporan Monev Bappenas 2024 - 2025

C. Pelaporan Kinerja	
1.	<p>Pada indikator “Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menyusun Lembar Pernyataan bahwa Dokumen LKjIP PN Pontianak Tahun 2024 telah direviu, diformalkan, dan kemudian ditambahkan pada Dokumen LKjIP Tahun 2024
2.	<p>Pada indikator “Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Agar melampirkan potongan bab yang memuat informasi sebagaimana yang ditanyakan pada kriteria c. File “Perbandingan Realisasi Kinerja PN Pontianak dengan Satker Lain Sesuai Tingkatannya” sudah dibuat namun belum disatukan ke dalam dokumen LKjIP Tahun 2024. Kedepannya agar dokumen LKjIP PN Pontianak memuat informasi Perbandingan Realisasi Kinerja PN Pontianak dengan Satker Lain Sesuai Tingkatannya
3.	<p>Pada indikator “Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menyusun dokumen Monev Rencana Aksi Tahun 2024 yang memuat jadwal monev, hasil/rekomendasi monev, dan tindak lanjutnya b. Agar melampirkan dokumen monev rapat dinas bulanan tahun 2025 (Notulensi, LHP dan TLHP) c. Agar menambahkan dokumen PKP seluruh aparatur PN Pontianak Tahun 2025 d. Agar menambahkan Dokumen Revisi Anggaran dan Rapat Revisi Anggaran Tahun 2025, serta Laporan Monev Bappenas 2024 - 2025 e. Agar melampirkan dokumentasi kegiatan penyesuaian perencanaan kinerja berupa Rapat Penentuan Target PKT/Rapat Reviu PKT f. Agar menyusun dokumen Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir di PN Pontianak (Apel Pagi/Sore, Banner Budaya Kerja, Pembinaan Budaya Kerja, Rewards)
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	<p>Pada indikator “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menyusun dan melampirkan SK Pedoman Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 dan 2025 b. Agar menyusun SOP Pengumpulan Data Secara Berjenjang c. Agar melampirkan Dokumen Rapat Dinas Evaluasi Kinerja Bulanan, Rapat Berjenjang Tiap Bidang, atau Rapat Kesekretariatan maupun Rapat Kepaniteraan Tahun 2024
2.	<p>Pada indikator “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai”, untuk optimalisasinya agar satker dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar menyusun SK Pedoman Evaluasi AKIP Internal dan SOP Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024 dan 2025 b. Agar menyusun SK Tim Penyusun SAKIP 2024 dan SK Tim Evaluasi AKIP Internal 2024 c. Agar menyusun dokumen Rapat Evaluasi AKIP Internal tahun 2024 sesuai SK dan SOP yang telah ditentukan d. Agar menyusun dokumentasi Sosialisasi LHE dan TL LHE AKIP Tahun 2023 ke seluruh jajaran PN Pontianak

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2024, agar rekomendasi ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Pontianak segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI